

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF JAMBI CITY GOVERNMENT 2010 – 2019**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019****Oleh:****Emilia Fornia¹⁾, Mukhzarudfa²⁾, Muhammad Gowon³⁾**

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, Bekerja di BPKAD Kota Jambi*
^{2&3)}*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*

Email: ¹⁾emilia.fornia@gmail.com ²⁾Mukhzarudfa@unja.ac.id ³⁾gowon@unja.ac.id

ABSTRACT

The application of the regional autonomy system requires regional government officials could manage finances in their regions effectively and efficiently. The purpose of this study is to analyze the Jambi City Government financial performance during 2010 to 2019 seen from regional financial independence, the degree of decentralization ratio, the effectiveness of PAD ratio, PAD growth ratio, and expending efficiency ratio. This research is a quantitative descriptive study using secondary data, which is sourced from Jambi City Government Budget Realization Report from 2010 to 2019. The results of this study to indicate the financial performance of Jambi City government, seen from regional financial independence ratio, is depressed level, the pattern of instructive relationship, the degree of decentralization ratios in the low category, the effectiveness ratio are belong to very effective, the average income growth ratio is 11,16 percent and the average expenditure growth is 10,82 percent, and the expending efficiency ratio is classified as efficient.

Keywords: Regional financial performance, financial ratios.

ABSTRAK

Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2010 hingga 2019 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio efisiensi belanja. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah berada pada level rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang, rasio efektifitas tergolong sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja tergolong efisien.

Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio keuangan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya memperbaiki segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang juga merupakan bagian dari proses pembangunan seluruh sistem ketatanegaraan guna mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam arti lain, pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang terus menerus dan mencakup seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan pembangunan (Perda Kota Jambi Nomor 7, 2019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan peluang usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. . Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten / kota dan pemangku kepentingan lainnya (Perda Kota Jambi Nomor 7, 2019). Landasan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Syauqi, Siregar & Syaikat, 2017). Pemberian otonomi luas dan desentralisasi fiskal merupakan pembukaan bagi pemerintah untuk pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Artinya apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga pendanaan daerah menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Syauqi et al., 2017).

Titik tolak pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, yang ditunjukkan dengan transparansi dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan APBN. Dapat dikatakan bahwa masyarakat harus memiliki akses terhadap proses penganggaran karena menyangkut ambisi dan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prinsip lainnya adalah akuntabilitas, yang merupakan tanggung jawab publik. Artinya, proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus dilaporkan secara benar kepada dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab tercermin dalam bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sesuai dengan prinsip tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan pemerintah, sebagaimana ditetapkan. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Suyono, 2010).

Pembangunan Kota Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi (RPJMD) bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara utuh di berbagai wilayah dengan mengutamakan pencapaian daya saing ekonomi yang berdaya saing berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan berkualitas tinggi. sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas iptek dan menjadikan kota jambi sebagai kota mandiri dengan struktur perekonomian yang stabil karena sektor jasa menjadi penggerak ekonomi utama, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan (Pemerintah Kota Jambi, 2019b).

Perkembangan di Kota Jambi saat ini sedang sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya hotel berbintang di Kota Jambi, pusat perbelanjaan seperti mall telah berkembang pesat. Pengembangan industri pariwisata juga dilakukan melalui pemanfaatan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi, seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan pariwisata terpadu, peningkatan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas publik, dan peningkatan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mempercepat kegiatan perekonomian masyarakat (Pemerintah Kota Jambi, 2019a).

Permasalahan pembangunan Kota Jambi khususnya di bidang keuangan antara lain: penerimaan daerah yang kurang optimal terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh penerimaan dalam APBD, kemandirian daerah yang rendah. terkait dengan dana perimbangan dan pendapatan daerah yang kurang optimal

Pendapatan Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2010 - 2019 terus meningkat setiap tahunnya serta total belanja yang terus meningkat setiap tahunnya. Sumber pendapatan terbesar Kota Jambi berasal dari pendapatan transfer. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi masih sangat bergantung pada pendapatan pemerintah pusat. Dari sisi belanja daerah, dampak dari Otoritas Otonomi Daerah terus tumbuh, dimana pemerintah daerah aktif dan lebih leluasa dalam

memberikan pendanaan untuk pengembangan segala bentuk kegiatan program pembangunan di daerah.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, menentukan kondisi keuangan, menentukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan memastikan bahwa pemerintah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah rasio keuangan (Wonda, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dilihat dari sisi kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dilihat dari sisi derajat desentralisasi?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dilihat dari sisi efektifitas PAD?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dilihat dari sisi pertumbuhan pendapatan dan belanja?
5. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dilihat dari sisi efisiensi belanja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dari sisi kemandirian keuangan daerah
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dari sisi derajat desentralisasi.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dari sisi efektifitas PAD.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dari sisi pertumbuhan pendapatan dan belanja.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dari sisi efisiensi belanja.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sama.
3. Bagi Pemerintah Kota Jambi, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam merealisasikan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi. Efektivitas hanya dapat diukur jika individu atau kelompok individu telah menetapkan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan tersebut berupa tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai (Mahsun, 2016).

2.2. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Menurut ayat 1 pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah, yang dapat diukur dalam bentuk uang dan dalam segala hal, baik dalam bentuk moneter maupun komoditas. Dapat digunakan sebagai milik daerah jika dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Ordonansi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011).

Keuangan daerah mencakup segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 atau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2019).

Bidang keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan biaya daerah serta memberikan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk berbisnis dengan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Pendapatan daerah;
4. Belanja daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikuasai pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat diukur dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dari perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan / atau kepentingan umum.

2.3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menggeser roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat yang wajib menyampaikan laporan keuangan daerah. Laporan ini berguna bagi masyarakat untuk dapat menilai apakah pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik atau tidak. Evaluasi efektivitas pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan APBD. Menurut (Sucandrawati, 2016), hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pendapatan daerah
3. Mengukur sejumlah kegiatan Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan / perkembangan pendapatan dan belanja yang dihasilkan selama kurun waktu tertentu.

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran atau yang biasa disebut dengan APBD adalah gambaran moneter dari suatu kebijakan pemerintah daerah, yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, serta pelaksanaan anggaran tahun lalu. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dirundingkan dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.5. Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan anggaran memuat gambaran umum tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah yang menggambarkan perbandingan anggaran dan pelaksanaannya selama satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang secara langsung tercakup dalam laporan pelaksanaan Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pendanaan. Masing-masing elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Republik Indonesia, 2010):

1. Pendapatan (basis kas). Pendapatan ini merupakan pendapatan bendahara negara / daerah atau badan pemerintah lainnya yang menambah modal saat ini dari dana tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan, yang merupakan hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan oleh negara.
2. Pendapatan (basis akrual). Pendapatan ini adalah undang-undang pemerintah yang diakui sebagai surplus kekayaan bersih.
3. Belanja (basis kas). Biaya-biaya tersebut termasuk semua pengeluaran bendahara negara / daerah yang mengurangi modal ekuitas dana berjalan selama tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diganti oleh negara.
4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang aktiva bersih.
5. Transfer adalah penerimaan atau pembayaran uang oleh entitas pelapor dari / kepada entitas pelapor lain, termasuk dana neraca dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap pendapatan / pengeluaran yang perlu dikembalikan dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penyusunan

APBN terutama ditujukan untuk menutup defisit atau surplus penggunaan anggaran

7. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil penjualan aset. Biaya keuangan digunakan, antara lain, untuk pembayaran kembali jumlah pokok pinjaman kepada organisasi lain dan untuk penyertaan modal negara.

2.6. Analisis Kinerja keuangan

2.6.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahsun, 2016).

2.6.2. Rasio Derajat Desentralisasi

Desentralisasi dihitung berdasarkan rasio antara total pendapatan daerah dan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Mahmudi, 2019).

2.6.3. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target berdasarkan potensi nyata daerah (Halim, 2008).

2.6.4. Rasio Efisiensi PAD

Rasio ini dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan yang tidak termasuk dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran yaitu data biaya pengumpulan PAD (Mahmudi, 2019).

2.6.5. Rasio Pertumbuhan

Faktor pertumbuhan berguna untuk menentukan apakah suatu pemerintah daerah telah mengalami pertumbuhan penerimaan atau pengeluaran yang positif atau negatif pada tahun anggaran tertentu atau selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019). Ada dua perhitungan tingkat pertumbuhan, yaitu pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan biaya.

2.6.6. Rasio Keserasian

Rasio kesesuaian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana secara optimal dalam sehari dan belanja pembangunan. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk pengeluaran sehari-hari berarti persentase pengeluaran investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menciptakan aset ekonomi dan infrastruktur bagi masyarakat pada umumnya lebih rendah. Ada dua perhitungan dalam rasio kesesuaian ini, yaitu rasio biaya operasional dan rasio biaya modal (Fathah, 2017).

2.6.7. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi biaya merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya. Rasio efisiensi pengeluaran ini digunakan untuk mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah (Mahmoudi, 2019).

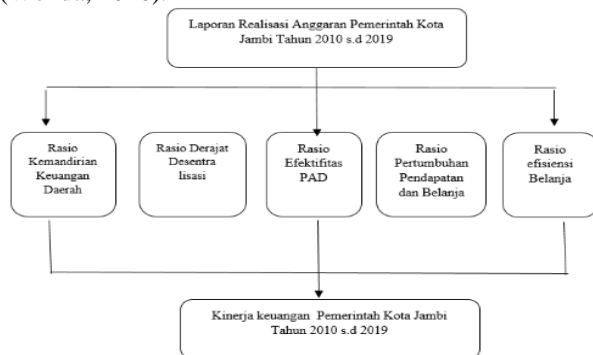
2.7. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah menurut undang-undang merupakan hak, wewenang, dan tugas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuatan organisasi nonpemerintah daerah terletak pada pengelolaan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan, prioritas dan kapasitas daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya (Susilowati, Retnowulan, & Widyanti, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer neraca, yang terdiri dari dana distribusi umum (DAU), dana distribusi khusus (DAK), dan dana distribusi pendapatan (DBH) pajak dan sumber daya. alam. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri berupa uang bibit daerah (PAD), pendanaan, dan sumber lainnya. Dengan demikian, pemerintah kabupaten / kota diharapkan dapat menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien, bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna menjamin kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014).

Laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa kepala daerah dapat dikaitkan dengan kewenangan yang dilimpahkan untuk menjalankan tanggung jawab menjalankan organisasi. Kantor wilayah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat menjawab pertanyaan tentang akuntabilitasnya (Mia, Raharjo, & Andini, 2016).

Metrik keuangan adalah metrik kinerja yang menggunakan metrik keuangan. Analisis kinerja keuangan terutama dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis guna memperoleh posisi keuangan yang mencerminkan realitas perusahaan dan potensi hasil yang akan berlanjut (Sucandrawati, 2016). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah rasio keuangan (Wonda, 2016).



Sumber : Diolah sendiri untuk penelitian.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data proses penelitian yang dimulai dari teori, hipotesis, disain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, dan menulis kesimpulan (Mudrajat, 2009).

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Kota Jambi dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi yakni salah satunya adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2010-2019.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi belanja.

3.4. Teknis Analisis Data

a. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahsun, 2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00 – 25,00	Instruktif
Rendah	25,00 – 50,00	Konsultatif
Sedang	50,00 – 75,00	Partisipatif
Tinggi	75,00 – 100,00	Delegatif

Sumber: Halim (2008)

Pola hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Halim, 2008):

1. Pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada otonomi daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dinilai lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, dimana tidak ada intervensi dari pemerintah pusat karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2019).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

c. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2008).

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasar potensi rii daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektifitas PAD

Persentase Efektifitas (%)	Kriteria Efektifitas
>100	Sangat Efektif
100	Efektif

90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2019

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif . (Mahmudi, 2019).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja th t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th t} - \text{Realisasi Belanja Th (t - 1)}}{\text{Realisasi Belanja Th (t - 1)}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Belanja

Persentase Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
Di atas 100	Tidak efisien
Sama dengan 100	Efisien seimbang
Di bawah 100	Efisien

Sumber : Mahmudi, 2019

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel. 6 dan gambar 2 berikut:

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman Daerah	Rasio Kemandirian	Keterangan
2010	70.842.049.481,02	621.326.550.405,00	11,40%	Rendah Sekali
2011	98.999.978.722,48	765.781.089.009,83	12,93%	Rendah Sekali
2012	113.090.049.195,12	903.954.112.502,59	12,51%	Rendah Sekali
2013	149.041.969.818,21	1.005.078.698.203,00	14,83%	Rendah Sekali
2014	246.427.699.826,28	1.064.949.342.896,00	23,14%	Rendah Sekali
2015	263.925.520.119,42	1.115.296.732.701,00	23,66%	Rendah Sekali
2016	287.525.214.004,49	1.244.767.208.043,98	23,10%	Rendah Sekali
2017	397.327.847.289,10	1.100.486.390.657,60	36,10%	Rendah
2018	338.891.882.592,96	1.226.565.920.909,83	27,63%	Rendah
2019	393.429.595.383,99	1.246.099.286.412,07	31,57%	Rendah
Total			216,88%	
Rata-rata			21,69%	Rendah Sekali

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi (diolah)



Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Berdasarkan tabel.6 dan gambar 2 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 rasio kemandirian Kota Jambi masing-masing sebesar 11,40 persen, 12,93 persen, 12,51 persen, 14,83 persen, 23,14 persen, 23,66 persen dan 23,10 persen yang berarti berada pada level rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Sementara pada tahun 2017 sampai dengan 2019 rasio kemandirian Kota Jambi masing-masing sebesar 36,10 persen, 27,63 persen dan 31,57 persen yang berarti berada pada level rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rasio kemandirian tertinggi selama sepuluh tahun terakhir adalah tahun 2017 sebesar 36,10 persen sedangkan rasio kemandirian terendah adalah tahun 2010 sebesar 11,40 persen.

Selama periode 2010 – 2019 secara rata-rata kemandirian keuangan Kota Jambi hanya sebesar 21,69 persen berada pada level rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Peran pemerintah pusat yang paling dominan adalah dalam hal membantu sistem roda pemerintah Kota Jambi khususnya untuk pembayaran gaji pegawai, belanja barang serta belanja modal.

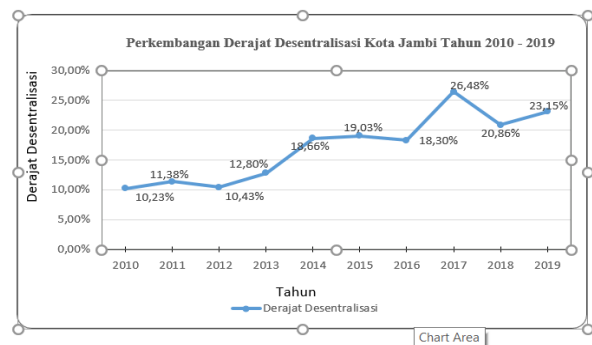
4.2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi Kota Jambi dapat dilihat pada tabel.7 dan gambar.3 berikut:

Tabel 7. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi	Keterangan
2010	70.842.049.481,02	692.168.599.886,02	10,23%	Kurang
2011	98.999.978.722,48	869.966.667.732,31	11,38%	Kurang
2012	113.090.049.195,12	1.083.917.282.197,71	10,43%	Kurang
2013	149.041.969.818,21	1.164.352.549.296,01	12,80%	Kurang
2014	246.427.699.826,28	1.320.648.890.197,28	18,66%	Kurang
2015	263.925.520.119,42	1.387.222.252.820,42	19,03%	Kurang
2016	287.525.214.004,49	1.571.332.218.626,47	18,30%	Kurang
2017	397.327.847.289,10	1.500.633.237.946,70	26,48%	Sedang
2018	338.891.882.592,96	1.624.877.312.712,19	20,86%	Sedang
2019	393.429.595.383,99	1.699.542.709.763,06	23,15%	Sedang
Total			17,31%	
Rata-Rata			17,13%	Kurang

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi (diolah)



Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 3. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Pada tabel 7 dan gambar 3 terlihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan masing-masing sebesar 10,23 persen, 11,38 persen, 10,43 persen, 12,80 persen, 18,66 persen, 19,03 persen dan 18,30 persen. Hal ini menunjukkan derajat desentralisasi Kota Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 termasuk dalam kategori kurang. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan termasuk pada kategori sedang yang masing-masing memberikan persentase sebesar 26,48 persen, 20,86 persen dan 23,15 persen. Persentase derajat desentralisasi terbaik selama sepuluh tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,48 persen.

Selama periode 2010 – 2019 secara rata-rata derajat desentralisasi Kota Jambi hanya sebesar 17,13 persen (kategori kurang). Rendahnya koefisien ini disebabkan rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Jambi untuk lebih

meningkatkan PAD yang disesuaikan dengan kapasitas dan potensi yang ada di Kota Jambi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecilnya PAD adalah sebagai berikut (Rafniati, 2019) :

1. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah.
2. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita.
3. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

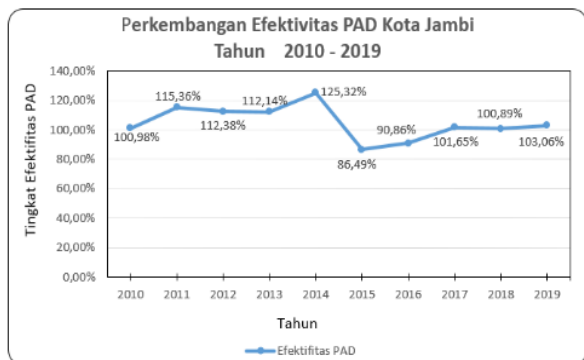
4.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel. 8 dan gambar 3 berikut:

Tabel 8. Rasio Efektifitas PAD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Target Penerimaan PAD	Efektifitas PAD	Keterangan
2010	70.842.049.481,02	70.151.342.519,00	100,98%	Sangat Efektif
2011	98.999.978.722,48	85.821.530.834,00	115,36%	Sangat Efektif
2012	113.090.049.195,12	100.633.402.320,00	112,38%	Sangat Efektif
2013	149.041.969.818,21	132.910.979.710,00	112,14%	Sangat Efektif
2014	246.427.699.826,28	196.639.197.900,00	125,32%	Sangat Efektif
2015	263.925.520.119,42	305.138.943.000,00	86,49%	Kurang Efektif
2016	287.525.214.004,49	316.463.773.600,00	90,86%	Cukup Efektif
2017	397.327.847.289,10	390.892.633.600,00	101,65%	Sangat Efektif
2018	338.891.882.592,96	335.902.135.250,00	100,89%	Sangat Efektif
2019	393.429.595.383,99	381.743.685.000,00	103,06%	Sangat Efektif
Total			1049,12%	
Rata-rata			104,91%	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi (diolah)



Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 4. Rasio Efektifitas PAD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Pada tabel 8 dan gambar.4 terlihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 persentase pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah masing-masing sebesar 100,98 persen, 115,36 persen, 112,38 persen, 112,14 persen, 125,32 persen. Pada Tahun 2015 dan 2016

persentase pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar 86,49 persen yang berarti berada pada level kurang efektif dan 90,86 persen. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah masing-masing sebesar 101,65 persen, 100,89 persen dan 103,06 persen.

Selama periode 2010 – 2019 secara rata-rata efektifitas PAD Kota Jambi hanya sebesar 104,91 persen berada pada level sangat efektif. Menurut Mahmudi (2019) nilai efektifitas PAD yang melebihi 100 persen berarti rasio efektifitas PAD termasuk kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas PAD Kota Jambi sudah efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan juga perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi staf serta keterlibatan Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
2. Penghapusan tunggakan pajak/ retribusi daerah serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) bagi wajib pajak yang tidak aktif.
3. Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/ retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
4. Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
6. Penerapan sanksi agar lebih tegas.

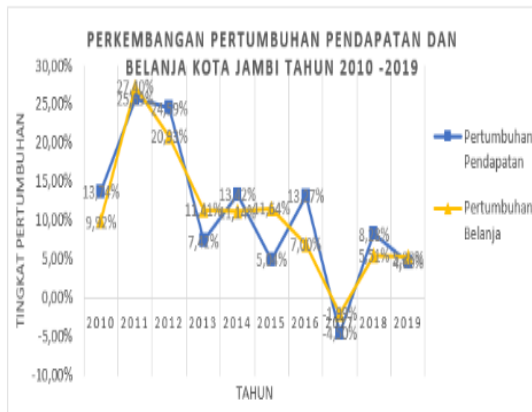
4.4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 9 dan gambar 5 berikut:

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Tahun	Pertumbuhan Pendapatan	Pertumbuhan Belanja
2010	13,74%	9,92%
2011	25,69%	27,40%
2012	24,59%	20,93%
2013	7,42%	11,41%
2014	13,42%	11,14%
2015	5,04%	11,64%
2016	13,27%	7,00%
2017	-4,50%	-1,99%
2018	8,28%	5,51%
2019	4,60%	5,28%
Total	111,55%	108,22%
Rata-rata	11,16%	10,82%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi (diolah)



Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Berdasarkan Tabel 9 dan gamba 5 Rasio Pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,16 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 25,69 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar -4,50 persen.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan belanja, rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,82 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 27,40 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar -1,99 persen.

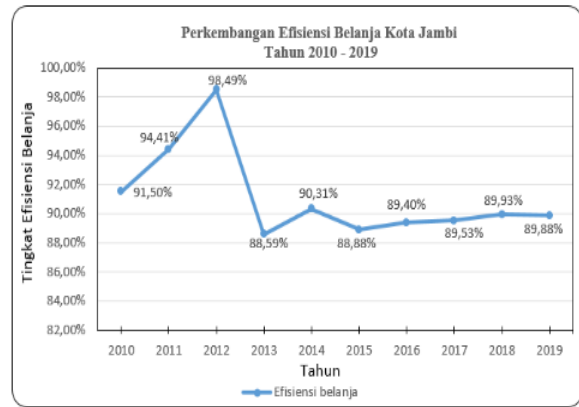
4.5. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja Kota Jambi dapat dilihat pada tabel. 10 dan gambar 6 berikut:

Tabel 10. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Efisiensi belanja	Keterangan
2010	731.617.277.957,00	669.435.527.754,92	91,50%	Efisien
2011	903.379.629.448,00	852.846.534.124,91	94,41%	Efisien
2012	1.047.100.061.276,00	1.031.313.340.884,89	98,49%	Efisien
2013	1.296.979.962.373,82	1.149.030.602.043,00	88,59%	Efisien
2014	1.413.931.124.461,00	1.276.975.539.348,50	90,31%	Efisien
2015	1.603.976.583.643,00	1.425.607.446.320,80	88,88%	Efisien
2016	1.706.345.622.920,00	1.525.413.835.576,45	89,40%	Efisien
2017	1.669.868.418.542,00	1.495.010.546.734,80	89,53%	Efisien
2018	1.753.859.500.067,00	1.577.311.832.700,20	89,93%	Efisien
2019	1.847.519.084.475,00	1.660.527.631.709,83	89,88%	Efisien
Total			910,92%	
Rata-rata			91,09%	Efisien

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi (diolah)



Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 6. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

Tabel 10 dan gambar 6 menunjukkan bahwa efisiensi belanja Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 dapat melakukan penghematan belanja. Realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan. Secara rata-rata rasio efisiensi belanja Kota jambi tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar 91,09 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja Kota Jambi efisien.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata selama tahun 2010 - 2019 berada pada level rendah sekali yakni sebesar 21,69 persen dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi rata-rata selama tahun 2010 - 2019 dapat dikategorikan kurang karena berada pada interval 10,01 persen – 20,00 persen yakni sebesar 17,13 persen. Rendahnya koefisien ini disebabkan rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio efektivitas PAD rata-rata selama tahun 2010 - 2019 tergolong sangat efektif karena koefisiennya berada diatas angka 100 persen yakni

sebesar 104,91 persen. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan PAD melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapat. Pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah penerimaan dari sektor pajak daerah yang melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,16 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Jambi positif. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja, rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,82 persen.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio efisiensi belanja rata-rata selama tahun 2010 - 2019 tergolong efisien yakni sebesar 91,09 persen. Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktutersebut dapat melakukan penghematan belanja. Realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.
2. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif- alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini diharapkan agar lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian yang penulis laksanakan ini

DAFTAR REFERENSI

- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government. *Ebbank*, 8(32), 33–48.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, M. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, M. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mia, O., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Journal of Accounting Of Accounting*, 2(2), 2.
- Mudrajat, K. (2009). *Metode Riset Untuk Ekonomi Bisnis* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Kota Jambi. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Jambi Tahun 2019*. , (2019).
- Pemerintah Kota Jambi. *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018 – 2023*. , (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. , (2011). Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. , (2010).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. , (2014).
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. , (2019).

- Sucandrawati, N. K. A. (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(2), 194.
- Suyono, S. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2017). Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1), 1–16.
- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal Emba*, 4(3), 192–200.